



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.656, 2014

KEMENDAGRI. Orientasi. Kepemimpinan.
Pemerintahan Daerah. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
ORIENTASI KEPEMIMPINAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepemimpinan bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota serta Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota perlu mengikuti orientasi kepemimpinan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota belum mengakomodir tentang orientasi bagi Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);**
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);**
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD
4. Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman dan pementapan tentang kepemimpinan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, kepemimpinan, dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diikuti oleh:

- a. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Materi pembelajaran Orientasi meliputi pokok bahasan:
 - a. demokrasi dan kebangsaan Indonesia;
 - b. sistem pemerintahan nasional dan daerah;
 - c. hubungan pemerintah daerah dan DPRD;
 - d. kepemimpinan dan etika pemerintahan;
 - e. pencegahan korupsi;
 - f. isu-isu aktual; dan
 - g. Aktualisasi.

- (2) Materi Pembelajaran Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Fasilitator/Narasumber Orientasi antara lain:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
- d. pejabat fungsional dan pejabat struktural sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pasal 6

Metode pembelajaran Orientasi, antara lain:

- a. ceramah;
- b. diskusi;
- c. simulasi;
- d. praktek;
- e. olah praja; dan
- f. studi banding.

Pasal 7

- (1) Menteri bertanggungjawab menyelenggarakan Orientasi.
- (2) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab terkait materi pembelajaran Orientasi.
- (3) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab pada pelaksanaan Orientasi.
- (4) Waktu pelaksanaan Orientasi selama 180 (seratus delapan puluh) jam pelajaran.
- (5) Tempat pelaksanaan Orientasi di Ibukota Negara.

Pasal 8

Peserta Orientasi yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Untuk mengetahui efektivitas dan pengembangan program dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Orientasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap peserta, materi pembelajaran, fasilitator/narasumber, metode pembelajaran, pelaksana dan fasilitas pendukung.

Pasal 10

Pendanaan Orientasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pedoman teknis Orientasi ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSYUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014.
TENTANG
ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN
ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	JUMLAH JAM PELAJARAN	METODE	FASILITATOR / NARASUMBER
1 Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI	3 1. Bupati; 2. Wakil Bupati; 3. Walikota; 4. Wakil Walikota; 5. Ketua DPRD Kabupaten/ Kota 6. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/ Kota	4 1. Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia 2. Sistem Pemerintahan Nasional dan Daerah	5 1. Konsep Demokrasi 2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia 3. Konsep Kebangsaan 4. Wawasan Kebangsaan Indonesia 1. Sistem Pemerintahan Nasional 2. Sistem Pemerintahan Daerah 3. Hubungan Pusat dan Daerah 4. Kerjasama antar Daerah 5. Birokrasi Pemerintahan	6 20 JP	7 1. Ceramah 2. Diskusi	8 1. Pejabat Negara 2. Pakar/Praktisi 3. Akademisi 4. Pejabat Fungsional 5. Pejabat Struktural. 1. Pejabat Negara 2. Pakar/Praktisi 3. Akademisi 4. Pejabat Fungsional 5. Pejabat Struktural.

NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	JUMLAH JAM PELAJARAN	METODE	FASILITATOR / NARASUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD	1. Kewenangan Pemerintah Daerah dan DPRD 2. Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD 3. Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	10 JP	1.Ceramah 2.Diskusi	1. Pejabat Negara 2. Pakar/Praktisi 3. Akademisi 4. Pejabat Fungsional 5. Pejabat Struktural.
			4. Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan	1. Konsepsi Kepemimpinan 2. Kepemimpinan Pemerintahan 3. Etika Pemerintahan 4. Etika Kepemimpinan Pemerintahan	10 JP	1.Ceramah 2.Diskusi	1. Pejabat Negara 2. Pakar/Praktisi 3. Akademisi 4. Pejabat Fungsional 5. Pejabat Struktural
			5. Pencegahan Korupsi	1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 2. Tindak Pidana Korupsi 3. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	10 JP	1.Ceramah 2.Diskusi	1. Pejabat Negara 2. Pakar/Praktisi 3. Akademisi 4. Pejabat Fungsional 5. Pejabat Struktural

NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	JUMLAH JAM PELAJARAN	METODE	FASILITATOR / NARASUMBER
1	2	3	4	5 4. Upaya Pencegahan Korupsi	6	7	8
			6. Isu-Isu Aktual	1. Lingkungan Hidup 2. Persaingan Global 3. Isu-Isu lain sesuai perkembangan	30 JP	1. Ceramah 2. Diskusi	1. Pejabat Negara. 2. Pakar/Praktisi. 3. Akademisi. 4. Pejabat Fungsional. 5. Pejabat Struktural.
			7. Aktualisasi	1. <i>Best Practices</i> Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Pengahiran 2. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Pengahiran 3. Mental, Fisik, dan Disiplin (MFD) a. Membangun Komitmen Belajar	30 JP	Studi Banding	1. Pejabat Negara. 2. Pakar/Praktisi. 3. Akademisi. 4. Pejabat Fungsional. 5. Pejabat Struktural.
					20 JP	Olah Praja	1. Pakar/Praktisi. 2. Akademisi. 3. Pejabat Fungsional. 4. Pejabat Struktural.
					30 JP	1. Ceramah 2. Simulasi 3. Praktek	1. Pakar/Praktisi 2. Pejabat Fungsional 3. Pejabat Struktural

NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	JUMLAH JAM PELAJARAN	METODE	FASILITATOR / NARASUMBER
1	2	3	4	5 (<i>Buiding Learning Commitment</i>) b. Senam c. Keprotokolalan.	6	7	8
JUMLAH					180 JP		

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI